

ABSTRAK

Elvy Marlina,SH/B23031011 /2025/Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah / Dr. Sarbaini, S.H., M.H., Sebagai Pembimbing I / Dr. Nazifah, S.IP, M.H, Sebagai Pembimbing II.

Pemerintahan daerah merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan di Indonesia. Desentralisasi kekuasaan yang diamanatkan oleh konstitusi bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan partisipasi lokal. Dalam konteks ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memegang peranan krusial sebagai representasi rakyat di tingkat lokal, dengan salah satu fungsi utamanya adalah pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Fungsi pengawasan ini menjadi fundamental untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi jalannya roda pemerintahan. Kinerja pemerintah daerah seharusnya mendapat perhatian lebih, bukan hanya pemerintah pusat saja yang menyorotinya, namun hal tersebut juga dilakukan oleh masyarakat setempat karena berkaitan dengan manfaat yang akan diterima masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan. Kinerja pemerintah daerah harus bisa dipertanggungjawabkan, mengingat bahwa pemerintah daerah berhak, berkewajiban dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Tujuan Penelitian ini yaitu : untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Jambi terhadap kinerja pemerintah daerah berdasarkan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi DPRD Kota Jambi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program pemerintah daerah, serta bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Metodologi penelitian menggunakan teknik yuridis sosiologis (empiris). Hasil penelitian yang didapat bahwa secara normatif DPRD telah memiliki landasan hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 153 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan tersebut, DPRD memiliki fungsi utama, salah satunya adalah fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan kebijakan pemerintah daerah. Dalam praktiknya, fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Jambi telah berjalan, namun efektivitasnya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain : keterbatasan sumber daya manusia, akses data dan informasi yang belum sepenuhnya terbuka, koordinasi yang belum optimal antara DPRD dan pemerintah daerah, serta pengaruh dinamika politik lokal yang kadang mengaburkan objektivitas pengawasan. Dengan demikian, agar fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah dapat berjalan secara lebih efektif dan sesuai dengan semangat desentralisasi serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu adanya komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk membangun sistem pengawasan yang terbuka, partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka saran yang disampaikan adalah perlu adanya penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di DPRD Kota Jambi, agar apa yang menjadi cita-cita daerah dapat terlaksana dengan baik berkaitan dengan penerapan *good governance*. Upaya penguatan fungsi pengawasan DPRD dapat diwujudkan dengan melakukan penataan regulasi terkait dengan pelaksanaan fungsi DPRD sebagai bagian dari pemerintahan di daerah yang memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, penggunaan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah dan upaya penguatan fungsi pengawasan DPRD juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota DPRD, hasil dari peningkatan kualitas dapat diukur dari seberapa besar peran DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap Kepala Daerah dalam pelaksanaan peraturan daerah, pelaksanaan anggaran dan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Kata Kunci : *Pengawasan, Kinerja Pemerintah Daerah, DPRD.*

ABSTRACT

Elvy Marlina,SH / B23031011 / 2025 / Analysis of the DPRD's Supervisory Function on the Performance of the Jambi City Regional Government in the Perspective of Law Number 23 of 2014 Concerning Regional Government/ Dr. Sarbaini, S.H., M.H., As Supervisor I / Dr. Nazifah, S.IP, M.H, As Supervisor II

Regional governments are at the forefront of public service delivery and development in Indonesia. The constitutionally mandated decentralization of power aims to bring services closer to the people, accelerate development, and increase local participation. In this context, the Regional People's Representative Council (DPRD) plays a crucial role as a representative of the people at the local level, with one of its primary functions being oversight of regional government performance. This oversight function is fundamental to ensuring accountability, transparency, effectiveness, and efficiency in government operations. Regional government performance should receive greater attention, not only from the central government but also from local communities, as it is related to the benefits they receive in achieving prosperity. Regional government performance must be accountable, given that regional governments have the right, obligation, and authority to regulate and manage their own government affairs and the interests of their local communities. The objectives of this research are: to determine and analyze the implementation of the effectiveness of the Jambi City DPRD's supervisory function on the performance of the regional government based on Article 153 of Law Number 23 of 2014, to determine what obstacles the Jambi City DPRD faces in carrying out its supervisory function on regional government policies and programs, and what solutions can be implemented to increase the effectiveness of supervision in accordance with statutory provisions. The research methodology uses sociological (empirical) juridical techniques. The research results show that normatively the Regional People's Representative Council (DPRD) has a strong legal basis as stipulated in Article 153 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. In this provision, the DPRD has a primary function, one of which is the supervisory function of the implementation of regional regulations and regional government policies. In practice, the supervisory function carried out by the Jambi City DPRD has been running, but its effectiveness still faces several obstacles, including: limited human resources, access to data and information that is not yet fully open, less than optimal coordination between the DPRD and the regional government, and the influence of local political dynamics that sometimes obscure the objectivity of supervision. Thus, in order for the DPRD's supervisory function on regional government performance to run more effectively and in accordance with the spirit of decentralization and the principles of good governance, there needs to be a joint commitment between the legislature and the executive to build an oversight system that is open, participatory and oriented towards public service. From the results of the research conducted, the suggestion submitted is that there is a need to strengthen the DPRD's supervisory function on the performance of the Regional Government in realizing good governance in the Jambi City DPRD, so that what is the ideal of the region can be implemented well in relation to the implementation of good governance. Efforts to strengthen the DPRD's supervisory function can be realized by arranging regulations related to the implementation of the DPRD's function as part of the regional government that has a strategic function and role in supervising the implementation of regional regulations, the use of budgets and regional government policies and efforts to strengthen the DPRD's supervisory function can also be done by improving the quality of human resources of DPRD members, the results of quality improvement can be measured from how big the DPRD's role is in supervising the Regional Head in implementing regional regulations, budget implementation and public policies that have been determined.

Keywords: *Supervision, Regional Government Performance, DPRD.*